

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arief, M. I., & SH, M. (2023). *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis Dan Pidana/Korupsi*. MCL Publisher.
- Boris Tampubolon, S.H. (2021). *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Prenada Media
- Budiman, A. (2024). *Perbuatan Melawan Hukum. Hukum Perdata*. Haji, B. T. (2020). *Pengertian Implementasi. Laporan Akhir*.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum: pendekatan kontemporer*. Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Haswandi, H., & SH, S. (2023). *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya: Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media.
- Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. (2024). (n.p.): PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hukum Perdata Dalam Dinamika Hubungan Antarpribadi. (2024). (n.p.): Cendikia Mulia Mandiri.
- Hukum Perdata. (2023). (n.p.): Sada Kurnia Pustaka.
- Hukum Perdata. (2024). (n.p.): CV. Gita Lentera.
- Klitgaard, R. (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan*. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia : Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. (2021). (n.p.): Penerbit EnamMedia.
- Pengantar Hukum Perdata. (2024). (n.p.): TOHAR MEDIA.
- Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus Kasus Perdata - Jejak Pustaka. (n.d.). (n.p.): Jejak Pustaka.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan melanggar hukum: dipandang dari sudut hukum perdata*. Indonesia: Mandar Maju.
- Rony Andre. (2022). *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. (n.p.): Penerbit EnamMedia.

- Saharuddin, D. (2016). *Pembayaran ganti rugi pada asuransi syariah*. Prenada Media.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Semma, M. (2008). Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumargo, B. (2020). *Teknik sampling*. Unj press.
- Syahrizal, D. (2011). Kasus-kasus hukum perdata di Indonesia. Indonesia: Pustaka Grhatama.
- Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi. (n.d.). (n.p.): Jakad Media Publishing.
- Tindak Pidana Korporasi. (2024). (n.p.): CV. Gita Lentera.
- Widiyastuti, Y. (2020). Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama).
- Yusni, M. (2019). Keadilan dan pemberantasan tindak pidana korupsi: perspektif kejaksaan. Indonesia: Airlangga University Press.

ARTIKEL DALAM JURNAL:

- Agustini, M. E. (2019). Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Memberikan Pelayanan pada Masyarakat Desa Legian. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. Binamulia Hukum.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*.
- Datau, R. (2017). Penggelapan dana simpanan nasabah sebagai kejahatan perbankan. *Lex Privatum*.
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur

Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*.

Gea, I. (2023). Kekuasaan Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*.

Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*.

Manik, B., Mulyadi, M., & Zul, M. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.

Mantili, R. (2019). Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.

Pustha, F. W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*.

Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*.

Rasyidi, M. A. (2020). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*.

Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.

Suhartono, S., & Jiwantara, F. A. (2023). *Optimalisasi Dan Implementasi Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Kritis terhadap Putusan Perkara Nomor: 29/Pid. Sus-TPK/2017/PN Mtr., jo. No: 14/PID. TPK/2017/PT MTR., jo. No: 930 K/PID. SUS/2018)*. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin.

SY, M. F., & Nurwina, N. (2024). Tinjauan Terhadap Tindakan Petahana Dalam Pemilihan Umum: Perbedaan Konsep Penyalahgunaan Kewenangan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan. *Jurnal Nomokrasi*.

Tambunan, H. J. P., & Simanungkalit, G. F. (2023). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Jabatandalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Diktum*.

Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*.

Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*.

PERATURAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

ARTIKEL ELEKTRONIK

<https://bantendev.id/berita/mengungkap-faktor-penyebab-korupsi-menurut-ibnu-khaldun-dan-strategi-pencegahannya>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkan-kasus-yang-sudah-diputus-pidanadigugat-perdata-lt629397e6dd166/>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/>

<https://tirto.id/bunyi-pasal-374-kuhp-tentang-penggelapan-dan-hukumannya-gwdm>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>

